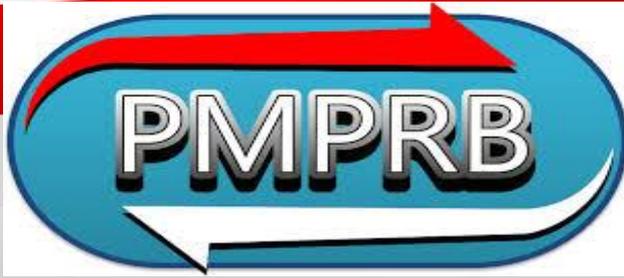




# Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

Panel 2 : Konsensus Panel Asesor  
Penetapan Nilai Pelaksanaan RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

**Setyanta Nugraha**  
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI



Surat MenPAN RB: B/53/M.RB.06/2017  
16 Februari 2017  
Diterima 18 April 2017

Sesuai PP 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan PerMenPAN RB 11/2015 ttg Road Map RB 2015-2019, Tim Kementerian PAN RB telah melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

*Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan MenPAN RB 14/2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah*

*Evaluasi difokuskan pada Upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR dalam pelaksanaan reformasi birokrasi*

Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Selain itu juga memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



## Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian	Hasil Evaluasi	% Capaian
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>							
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	3,92	<b>5,00</b>	<b>100</b>	4,10	82,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,88	2,29	<b>5,00</b>	<b>100</b>	2,71	54,20
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	<b>6,00</b>	<b>100</b>	2,82	47,00
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,34	3,60	<b>4,51</b>	<b>90,10</b>	3,21	64,20
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	5,07	11,65	<b>14,81</b>	<b>98,71</b>	13,21	88,06
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,33	<b>5,74</b>	<b>95,6</b>	1,88	31,33
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,12	6,18	<b>8,47</b>	<b>70,57</b>	5,76	48,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,96	2,96	<b>5,39</b>	<b>89,75</b>	3,36	56,00
		60,00	26,92	37,77	<b>54,99</b>	<b>91,50</b>	<b>37,05</b>	<b>61,75</b>



## Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian	Hasil Evaluasi	% Capaian
<b>B</b>	<b>Hasil</b>							
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	8,56	12,40	<b>12,57</b>	<b>64,85</b>	<b>13,08</b>	<b>65,40</b>
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	8,07	<b>10,00</b>	<b>100</b>	<b>8,55</b>	<b>85,50</b>
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	0,00	7,75	<b>7,50</b>	<b>75,00</b>	<b>7,55</b>	<b>75,50</b>
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	11,56	28,22	<b>30,47</b>	<b>76,18</b>	<b>29,17</b>	<b>72,92</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100,00</b>	<b>38,48</b>	<b>65,99</b>	<b>66,22</b>		<b>66,22</b>	



# Upaya yang telah dilakukan



Penggunaan e-government telah dilakukan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan



Road Map Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang disusun telah memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing area perubahan dan quick win yang sesuai dengan kinerja utama organisasi



Telah melakukan upaya penyempurnaan organisasi agar lebih fleksibel dalam pengelolaan Setjen DPR RI selaras dengan prioritas pembangunan nasional



Telah dilakukanya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama



# HASIL SURVEY INTERNAL 2015

## IKP

### Indeks Kualitas Pelayan

Hasil survey layanan persidangan, layanan kesehatan, dan layanan perpustakaan yang dilakukan melalui purposive random sampling menunjukkan **IKP sebesar 2,92** dari skala 4,00 -> **Belum Menggembirakan.**

Unsur pelayanan biaya atau tariff perlu diperbaiki, karena dibawah rata-rata, sedangkan untuk indeks yang lain perlu dipertahankan dan tetap dilakukan peningkatan agar tidak tertinggal dari K/L lain.

**Maklumat Pelayanan agar diperhatikan**

## IPAK

### Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK Setjen DPR RI **2,85** dari skala 4,00 atau masih berada dibawah rata-rata 28 K/L, yaitu 3,00

# SURVEY INTERNAL 2016

NO	KOMPONEN	INDEKS
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,27
2	Integritas Pengelolaan SDM	3,08
3	Integritas Pengelolaan Anggaran	3,44
4	Integritas Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,41

Indeks Integritas Organisasi menggambarkan persepsi para pegawai terhadap kualitas penerapan system integritas yang berlaku secara internal. Indeks Integritas sesuai PerMenPAN RB 52/2014, idealnya adalah 3,60



# HASIL SURVEY INTERNAL 2015

## IKP 2015

Indeks Kualitas Pelayanan

Hasil survey layanan persidangan, layanan kesehatan, dan layanan perpustakaan yang dilakukan melalui purposive random sampling menunjukkan **IKP sebesar 2,92** dari skala 4,00 -> **Belum Menggembirakan.**

**Maklumat Pelayanan agar diperhatikan**

## IKP 2016

Indeks Kualitas Pelayanan

*Peningkatan*

Indeks 3,02 dari skala 4,00

## IPAK 2015

Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK Setjen DPR RI **2,85** dari skala 4,00 atau masih berada dibawah rata-rata 28 K/L, yaitu 3,00

## IPAK 2016

Indeks Persepsi Anti Korupsi

*Peningkatan*

Indeks 3,17 dalam skala 4.00



**Anggota DPR RI**



**Masyarakat**



**Mitra Kerja**



# PENYEMPURNAAN

Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik, dan terukur untuk setiap area perubahan yang dicapai

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing-masing area perubahan utk melihat perkembangan RB

Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar menjadi budaya yang melakat dalam setiap individu

Menyusun dan menyempurnakan peta proses bisnis yg sesuai dengan kinerja utama Setjen dan BKD serta melakukan reviu secara berkala terhadap standar operasional yang telah ditetapkan

Menyusun dan melakukan evaluasi atas kebijakan informasi terbuka sebagai upaya melakukan tranparansi dalam manajemen kinerja



# PENYEMPURNAAN

Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran secara berkala terhadap pegawai yang telah menetapkan target kinerja individu dan mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan kompetensi serta remunerasi yang diterima

Memperkuat penerapan system integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, wistle blowing system penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi

Mendorong penerapan Zona Integritas yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat

Menyusun pedoman penerapan system akuntabilitas kinerja internal unruk mendorong penguatan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran nagera

Reviu atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan public dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut



# KATEGORI PENILAIAN

No	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	<b>Istimewa</b>
2.	A	> 80 – 90	<b>Memuaskan</b>
3.	BB	> 70 – 80	<b>Sangat Baik</b>
4.	B	> 60 – 70	<b>Baik</b> , perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 – 60	<b>Cukup baik</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 - 50	<b>Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.



# KEGIATAN PMPRB 2017





#Ayo berubah!

TERIMA KASIH  
[Ittama.dpr.go.id](http://Ittama.dpr.go.id)

